

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KEC. KUNDUR BARAT KAB. KARIMUN**



**OLEH:**

**FITRIANA**

**NIM. 10675005069**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN**  
**KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN**

**Oleh:**

**FITRIANA**  
**10675005069**

*Penelitian ini dilaksanakan kepada masyarakat di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan, yaitu : Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan Untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.*

*Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) sebagai wajib Pajak. Mencermati jumlah populasi yang ada, maka teknik penarikan sampelnya digunakan secara Proportionate Stratified Random Sampling, yaitu suatu teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai unsur/anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, sebesar 5% dari wajib pajak.*

*Dalam pengambilan data, menggunakan data primer dan skunder yang dilakukan secara observasi, wawancara dan penyebaran angket kepada responden. Selanjutnya data tersebut dianalisa secara Deskriptif Kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan kemudian diambil suatu kesimpulan.*

*Dari pengolahan data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kundur barat disebabkan oleh Tingkat Pelayanan yang dimana 50,9% dari responden menyatakan pelayanan PBB kurang baik.*

*Oleh karena itu, agar masyarakat mu berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan perlu meningkatkan pelayanan yang baik dan penyuluhan secara periodik oleh pegawai pajak di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>DAFTAR TABEL</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
<b>BAB II : TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	15
2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.4 Pajak dalam Pandangan Islam	22
2.5 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	23
2.7 Defenisi Operasional	25
2.8 Teknik Pengukuran	26
2.9 Hipotesis	29
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian	30
3.2 Jenis dan Sumber Data	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4 Populasi dan Sampel	31
3.5 Teknik Analisis Data	33
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Karakteristik Wilayah	34
4.2 Keadaan Demografi	34
4.3 Struktur Pemerintahan	40
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Identitas Responden	47
5.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Membayar PBB di Kec.Kundur Barat	51
5.3 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara sedang membangun dan pembangunan yang dilakukan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik di Negara maju, Negara yang sedang berkembang, maupun Negara yang terkebelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang yang juga menyelenggarakan kegiatan pembangunan Nasional secara bertahap dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spritual berdasarkan Pancasila.

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia membutuhkan dana atau pembiayaan yang sangat besar jumlahnya. Dilihat dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemasukan dana yang diterima oleh negara diperoleh dari dua sumber yaitu penerimaan dari dalam negeri dan bantuan luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri diperoleh dari sektor minyak dan gas (migas) dan dari sektor non migas (pajak dan non pajak). Sedangkan bantuan dari luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Sedangkan penerimaan disektor migas sesuai

dengan hukum alam jika dieksploitasi secara terus menerus cenderung akan habis. Semestinya pajak dipungut tanpa terlalu membebani rakyat dan adil dalam pelaksanaannya. Masalah pajak tercantum dalam pasal 2 ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

“Pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang”.

Peranan masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan roda pemerintahan amat besar. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa pelayanan untuk umum, membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, perumahan, air minum, listrik, transportasi, gaji kepada PNS, fasilitas keamanan, dan banyak hal lainnya yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan Negara.

Akses timbal balik yang langsung dapat dirasakan masyarakat dengan keikutsertaan secara aktif dalam membayar pajak adalah mereka mempunyai potensi untuk bersuara dan mengontrol pemerintah, karena pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah sebagian besar dibiayai oleh pajak. Disisi lain kita selaku masyarakat tidak boleh lupa pajak merupakan bentuk tanggung jawab warga Negara dalam menjalankan kehidupan bernegaranya.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah penerimaan Negara yang paling potensial. Penerimaan Negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain pendapatan Negara dari sektor pajak merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi yang

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat disuatu Negara. Jadi dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha melibatkan rakyat dalam pembangunan.

Sadono Sukirno (2006 : 11) Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat secara berketerusan dalam jangka panjang. Berdasarkan pendapat Sadono Sukirno tersebut dalam usaha meningkatkan pendapatan tersebut, pemerintah ingin melibatkan rakyat dalam pembangunan secara keseluruhan yaitu dengan keterlibatan dalam usaha pembayaran pajak, baik itu pajak pendapatan, pajak penjualan maupun pajak-pajak lainnya. Seperti kita ketahui peran pajak disini berguna dalam membantu dana untuk pembiayaan pembangunan yang ditujukan pemerintah untuk rakyat.

Melihat dari urgensi pajak tersebut, masing-masing Negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya dengan berbagai jenis dan sistem pengenaan. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

### **1. Pajak Negara**

Pajak Negara yang masih berlaku adalah :

#### **a. Pajak Penghasilan (PPh)**

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah UU No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000.

#### **b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn Bm)**

Dasar hukum pengenaan pajak PPN dan PPn BM adalah UU No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000.

c. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah UU No. 13 Tahun 1985.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1984.

e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000.

## **2. Pajak Daerah**

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaran diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan di atas air.
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga atau pertanian rakyat.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
  - b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
  - c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton



atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Pakir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Dari semua jenis pajak yang ada di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah pusat dan daerah.

Dampak Pajak Bumi dan Bangunan ini akan terasa dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah terutama dengan adanya perkembangan Otonomi Daerah yang didukung dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari seluruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah sebesar 90% yang terdiri atas 9% upah pungut, 16,2% untuk Pemda Tingkat I (Propinsi) dan 64,8% untuk Pemda Tingkat II (Kabupaten/Kota) dan 10% ditahan sebagai penerimaan Pemerintah Pusat.

Lebih ditegaskan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Pajak Bumi dan bangunan yang termasuk kedalam pajak negara yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Karimun dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di kabupaten karimun sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan PBB**  
**Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Karimun.**

No	Tahun	Target (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	%
1	2007	2.755.552.190	880.919.955	32
2	2008	2.804.237.633	1.383.841.363	49
3	2009	3.114.076.685	561.916.070	18

**Sumber** : *Dispenda Kabupaten Karimun Tahun 2010*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan telah memberikan kontribusi yang potensial kepada Kabupaten Karimun walaupun realisasi penerimaannya mengalami perubahan pendapatan dari tahun ketahun. Hal ini ditunjukan pada tabel diatas yakni adanya peningkatan dan penurunan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Kabupaten Karimun terdiri dari 9 kecamatan yang telah memberikan kontribusinya kepada daerah, hal ini dapat dilihat pada Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Karimun selama Tahun 2009.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan PBB Pedesaan dan perkotaan**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2009 Menurut Kecamatan.**

No	Wilayah	Target	Realisasi	%
1	Kec. Karimun	1.218.265.342	191.843.371	16
2	Kec. Meral	562.384.892	140.189.010	25
3	Kec. Tebing	562.219.311	122.812.444	22
4	Kec. Kundur	378.141.947	72.266.385	19
5	Kec. Kundur Barat	85.407.467	14.186.904	17
6	Kec. Kundur Utara	56.566.364	13.172.126	23
7	Kec. Buru	56.688.531	3.783.249	7
8	Kec. Moro	157.732.560	2.698.627	2
9	Kec. Durai	36.670.271	963.954	3

**Sumber : *Dispenda Kabupaten Karimun Tahun 2010***

Kecamatan Kundur Barat tempat penelitian penulis merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Kundur Barat berada di urutan kelima diantara sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunannya dan dari tabel dapat diketahui bahwa Kecamatan Kundur Barat memiliki potensi yang besar untuk sementara itu kontribusinya masih kurang. Hal ini juga dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.3**

**Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Kundur Barat**

No	Tahun	Target (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	%
1	2007	92.021.014	21.603.813	23
2	2008	82.709.865	28.028.952	34
3	2009	85.407.467	14.186.904	17

**Sumber : *Dispenda Kabupaten Karimun Tahun 2010***

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir kontribusi Pajak Bumi dan bangunan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2009 penerimaan Pajak Bumi dan bangunan malah mengalami penurunan yaitu hanya 17 % dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 34 %.

Dengan demikian dapat dipahami, penerimaan negara maupun suatu daerah tidak hanya berasal dari pihak pemerintah melalui kekayaan alam, hasil perusahaan negara/daerah atau pinjaman lainnya tetapi juga berasal dari partisipasi masyarakat yang harus dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keberhasilan Pemerintah nantinya dalam hal peningkatan penerimaan pajak ini berarti kita dapat membiayai segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, tanpa tergantung dari bantuan luar Negeri lagi.

Supaya penerimaan pajak itu berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan negara serta setiap wajib pajak harus membayar maka setiap orang harus mengerti

tentang arti dan fungsi pajak. Tanpa adanya pengertian dari masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.

Pada saat sekarang ini banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Masyarakat harus sadar bahwa membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat atau masyarakat itu sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun”**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

**“Mengapa Partisipasi Masyarakat rendah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun”**.

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kundur Barat.
2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat bagaimana cara dan prosedur dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Sumbangan pikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini.
3. Sebagai bahan Informasi peneliti-peneliti lainnya, dengan permasalahan yang sama.
4. Dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : Telaah Pustaka**

Dalam bab ini berisikan telaah pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut reprensi-reprensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu pengertian partisipasi masyarakat, pengertian pajak bumi dan bangunan, objek dan subjek pajak bumi dan bangunan, pajak dalam pandangan islam, dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan, tarif pajak bumi dan bangunan, defenisi operasional, teknik pengukuran dan hipotesis.

### **BAB II : Metodologi Penelitian**

Pada bab ini berisikan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel dan analisis data.

### **BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.



## **BAB V : Analisis Data**

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan di Kecamatan Kundur Barat.

## **BAB VI : Penutup**

Pada bab ini berisikan kasimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Ditinjau dari etimologis, kata partisipasi merupakan padanan dari kata *participatie* (bahasa belanda) atau *participation* (bahasa inggris) yang berarti bagian atau ikut serta. Menurut Alex (2005 : 478) partisipasi berasal dari kata *participation* yang berarti partisipasi atau peran serta; keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Davis dan Newstrom dalam Hendra (2007:16) Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu.

Seligman dan Edwin dalam Muhammad Al Amin (2003 : 9) menyatakan bahwa “partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar”. Dari pengertian diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi itu selalu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam kelompok masyarakat.

Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang

dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu ditujukan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (Pasaribu Simandjuntak, 1986 : 345).

Ada beberapa jenis partisipasi menurut Pasaribu Simandjuntak (1986 : 349-352) yaitu :

- a. *Partisipasi Buah Fikiran*, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat.
- b. *Partisipasi Tenaga*, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- c. *Partisipasi Harta Benda*, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembanguana desa, pertolongan bagi orang lain atau sebagainya.
- d. *Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran*, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. *Partisipasi "Sosial"*, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan, nyambungan, mulang sambung.

Wahyudi Kumorotomo (2005: 136-138) Partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Partisipasi dalam Pemilihan (*electoral participation*)
2. Partisipasi Kelompok (*group participation*)
3. Kontak antara Warga Negara dan Pemerintah (*citizen-government contacing*)
4. Partisipasi Warga Negara secara Langsung di Lingkungan Pemeruntahan.

Agar jaringan partisipasi mampu berfungsi sebagai pembangkit tenaga sosial, maka menurut Pasaribu dan Simandjuntak (2004 : 352-353) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantara lain:

1. Rasa Senasib dan Sepenaggungan, Ketergantungan dan Keterikatan (*sense of belonging dan sense of commitment*).

Dalam suatu masyarakat, jika warganya masing-masing merasa tergantung dan terikat satu sama lain, masing-masing merasa bahwa ketergantungan dan keterkaitan itu biasanya saling mengangkat martabat masing-masing dan masyarakat semacam itu dapat diharapkan suatu tingkat partisipasi yang sangat menonjol dapat membangkitkan tenaga yang tidak mungkin diperkirakan.

2. Keterikatan Terhadap Tujuan Hidup.

Keterikatan rasa saja tidak akan membawa peserta ke perubahan yang diidam-idamkan, tidak akan berhasil mendorong manusia bersikeras mempersempit batas-batas kemustahilan. Banyak bukti, bagaimana rasa keterikatan ini berakhir pada pola hidup “ruing mungpulung bongkok ngaronyok” ( makan tidak makan asal kumpul). Oleh karena itu tujuan yang jelas sangat penting; ketetapan hati di antara peserta, sikap yang bersikeras dan tahan uji dalam usaha mencapai tujuan yang telah dipilih dengan sebaik-baiknya. Pra-syarat inilah yang sering langka, hampir tidak ada dalam bentuk partisipasi.

3. Adanya Prakarsawan.

Pra-syarat lain dalam membina partisipasi masyarakat adalah adanya prakarsawan yang memulai. Adanya orang yang memprakarsai perubahan merupakan prasyarat yang penting dalam membina masyarakat.

#### 4. Iklim Partisipasi.

Terciptanya iklim yang memungkinkan partisipasi merupakan pra-syarat yang tidak kalah pentingnya.

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan iklim partisipasi, yaitu :

- a. Kedaulatan perorangan setiap peserta tetap dihormati oleh peserta lain yang terlibat dalam jaringan partisipasi.
- b. Wewenang yang telah dilimpahkan kepada sekelompok peserta harus tetap dihormati dan dilindungi dari campur tangan dan rongrongan dalam bentuk apapun.
- c. Wewenang yang lebih tinggi tidak dipergunakan untuk mempengaruhi keputusan yang secara resmi telah dilimpahkan kepada bawahan.
- d. Orang dan pihak yang akan terpengaruh oleh keputusan mengenai partisipasi, setidaknya dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- e. Tertanamnya perasaan dan pengertian, bahwa keikutsertaannya seseorang atau sekelompok peserta mempunyai arti yang relevan bagi dirinya dan masyarakat disekitarnya.
- f. Adanya komunikasi, dan komunikasi ini harus atas dasar tenggang- rasa dan anggapan duduk sama rendah berdiri sama tinggi.

#### 5. Adanya Pembangunan.

Pra-syarat ini dicantumkan paling belakang, tetapi bukan berarti ia paling tidak penting justru sebaliknya. Ada tidak adanya pembangunan merupakan faktor kritis bagi ada tidak adanya dorongan pertama bagi partisipasi masyarakat.

Dengan adanya pembangunan maka akan dapat digalakkan dan menyalakan api partisipasi masyarakat. Partisipasi tidak terjadi dalam *vacuum*, partisipasi adalah *Post –develomental*. Paling sedikit partisipasi hanya dapat terjadi bersama-sama dengan adanya pembangunan.

## **2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Sri Pudjatmoko (2002 : 2) Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dr. Soeparman Soemahamidjaja, dalam dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran bandung Tahun 1964, memberi defenisi pajak, yaitu iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Prof. PJA. Adriani juga memberi defenisi tentang pajak yaitu iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian Pajak Bumi dan Bangunan diatas dapat ditegaskan, pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada kas Negara atas

jasa yang diberikan pemerintah dan sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan atau Undang-undang yang berlaku, yang penggunaannya diperuntukkan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya.

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1985, Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

### **2.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan bangunan**

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1994, yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan padalaman (termasuk rawa-rawa pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Termasuk dalam pengertian bangunan disini adalah:

1. Jalan Tol
2. Kolam Renang
3. Pagar Mewah
4. Tempat Olahraga
5. Galangan Kapal, dermaga
6. Tempat Penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

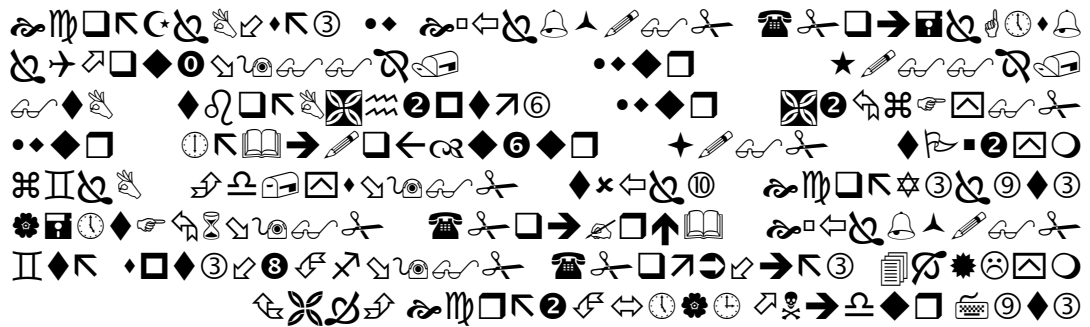
Sedangkan subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan, maka yang dimaksud dengan subjek pajaknya orang/badan yang :

1. Mempunyai hak atas bumi; dan/atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi; dan/atau
3. Memiliki dan menguasai bangunan; dan/atau
4. Memperoleh manfaat atas bangunan.



## 2.4 Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 29:



Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (At-Taubah ayat 29).

## 2.5 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

4. *Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002* tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. *Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985* tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
6. *Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985* tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
7. *Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985* tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.
8. *Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998* tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2.6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak dipungut berdasarkan tarif. Tarif pajak merupakan suatu ukuran standar dari suatu pemungutan pajak yang dapat mempergunakan perhitungan proporsi (persentase) atau bersifat tetap.

Menurut Indra Ismawan (2000 : 9) ada empat tarif pajak antara lain yaitu:

### **1. Tarif Proporsional**

Tarif proporsional adalah tarif pajak dengan proporsi (dinyatakan dalam persentase) yang tetap. Pajak yang harus dibayar harus sesuai dengan dasar pengenaan pajak dengan persentase tarif pajak yang sama. Dengan demikian semakin besar dasar pengenaan pajaknya, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, semakin kecil dasar pengenaan pajak maka akan semakin kecil pula jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada kas negara. Pada prakteknya tarif proporsional tidak digunakan untuk PPh (Pajak Penghasilan), melainkan dipakai untuk jenis pajak yang lain misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

## **2. Tarif Progresif**

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak dengan persentase yang semakin besar bagi dasar pengenaan pajak yang semakin besar. Pemerintah menetapkan klasifikasi dasar pengenaan pajak berdasarkan kelompok-kelompok dengan tingkat penghasilan yang berbeda-beda, yang kemudian diberi tarif pajak yang berbeda-beda pula. Pada tarif progresif persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## **3. Tarif Degresif**

Tarif degresif adalah pemungutan pajak dengan persentase tarif yang semakin menurun apabila dasar pengenaan pajaknya bertambah besar. Tarif degresif merupakan kebaikan dari pemungutan pajak dengan tarif progresif.

## **4. Tarif Tetap**

Besarnya tarif pajak ditentukan dengan jumlah nominal (bukan persentase) yang tetap tanpa memandang besar kecilnya dasar pengenaan pajak.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.

## **2.7 Definisi Operasional**

Guna mendapat persamaan pengertian tentang konsep-konsep dalam penulisan ini serta untuk menghindari kesalahan penafsiran maka penulis merasa perlu mengemukakan konsep-konsep dan memberikan penjelasan terhadap indicator-indikatornya:

- a. Pendidikan adalah status seseorang mendapatkan pendidikan formal dari:
  1. Perguruan Tinggi/Akademi atau yang sederajat.
  2. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
  3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.
  4. Sekolah Dasar atau sederajat.
- b. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah jenis pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang, dalam mendapat balas jasa atau sesuai dengan pekerjaan yang ditekuninya. Dalam hal ini jenis pekerjaan tersebut adalah:
  1. Bersifat formal adalah pekerjaan yang jelas dalam struktur dan tingkatannya seperti Departemen atau Perusahaan.
  2. Bersifat non formal adalah pekerjaan yang tidak ada strukturnya.
- c. Pendapatan objek pajak adalah pengumpulan data-data mengenai bumi dan bangunan, petugas wajib melakukan pengukuran-pengukuran yang akurat dan benar di lapangan atau lokasi.

- d. Pengiriman SPPT atau surat pemberitahuan pajak terhutang adalah pemberitahuan atau pemberian surat pajak terhutang kepada wajib pajak untuk membayar pajak mereka, sesuai dengan jumlah tanah dan bangunan mereka.
- e. Penyuluhan wajib pajak adalah pemberian pengetahuan kepada wajib pajak agar lebih mengerti tentang arti dan fungsi pajak.

## **2.8 Teknik Pengukuran**

Agar penelitian menjadi lebih baik dan ilmiah serta diakui kebenarannya maka perlu digunakan suatu pengukuran agar tidak terjadi kesalahan nantinya di lapangan. Dalam teknik pengukuran ini, penulis mencoba mengukur melalui variabel-variabel yang ada dalam definisi operasional.

- a. Pendidikan adalah salah satu dari faktor yang menentukan tingkat pendapatan dan partisipasi seseorang untuk itu dapat kita lihat:
  - 1. Tinggi, apabila pendidikan masyarakat tamatan Perguruan Tinggi/Akademi.
  - 2. Sedang, apabila pendidikan masyarakat tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
  - 3. Rendah, apabila pendidikan masyarakat tidak tamat Sekolah dan Sekolah Dasar.

- b. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini khusus jenis pekerjaan wajib pajak, dapat diukur sebagai berikut:
1. Tinggi, apabila 70-100% jumlah penduduk mempunyai pekerjaan disektor formal.
  2. Sedang, apabila 50-69% jumlah penduduk mempunyai pekerjaan disektor formal.
  3. Rendah, apabila jumlah penduduk yang bekerja disektor formal kecil dari 49%.
- c. Pendapatan objek pajak adalah pengukuran objek pajak oleh petugas untuk menentukan seberapa besar jumlah pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat diukur sebagai berikut:
1. Baik, apabila pendapatan objek pajak oleh petugas berdasarkan data yang didapat dari lapangan yang benar dan akurat.
  2. Sedang, apabila pendapatan objek pajak oleh petugas dimana petugas mendatangi wajib pajak tetapi tidak melakukan pengukuran.
  3. Rendah, apabila petugas melakukan pendataan berdasarkan perkiraan semata-mata.
- d. Pengiriman SPPT adalah pemberian surat pajak terhutang kepada wajib pajak agar membayar pajak sesuai dengan batas jatuh tempo dapat diukur sebagai berikut:

1. Baik, apabila pengiriman surat pemberitahuan pajak terhutang dilakukan 1 sampai 5 bulan sebelum batas akhir pembayaran pajak atau jatuh tempo.
  2. Sedang, apabila pengiriman surat pemberitahuan pajak terhutang dilakukan 6 sampai 11 bulan sebelum batas akhir pembayaran pajak atau jatuh tempo.
  3. Buruk, apabila pengiriman surat pemberitahuan pajak terhutang dikirim 1 bulan menjelang batas akhir pembayaran pajak atau jatuh tempo.
- e. Penyuluhan akan mempengaruhi dari pada kemauan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak mereka dapat diukur sebagai berikut:
1. Baik, apabila penyuluhan dilakukan atau dilaksanakan dalam setahun berkisar antara 3-4 kali.
  2. Sedang, apabila penyuluhan dilakukan oleh petugas dalam setahun 2-3 kali.
  3. Buruk, apabila penyuluhan dilakukan oleh petugas dalam setahun 1-2 kali.

## **2.9 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Jadi hipotesis juga dapat menyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiono, 2005: 70).

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, maka penulis mengambil hipotesa yaitu: “Diduga Partisipasi masyarakat di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun masih rendah untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh faktor pendidikan, pekerjaan, kurangnya pelayanan, kurangnya penyuluhan”.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Camat Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun pada Tahun 2010.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dari penelitian ini yaitu Kepala Keluarga yang menjadi wajib pajak yang diambil sebagai sampel dan kemudian data ini dianalisa. Data tersebut diantaranya:

- a. Data tentang responden
- b. Data tentang tingkat pembayaran atau kesediaan membayar PBB

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi pemerintahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk mempermudah penelitian antara lain data tentang:

- a. Lokasi penelitian
- b. Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat.
- c. Keadaan sarana dan prasarana.
- d. Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Yaitu teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan yang menjadi objek penelitian penulis.

2. Interview

Yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Kuesioner (Angket)

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan (angket) yang disusun secara tertulis dan diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban data yang dicari.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2006 : 90).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Kundur Barat yang berjumlah 4.702 kepala keluarga.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (Sugiyono : 2006 : 91). Adapun teknik yang digunakan adalah teknik Random Sampling.

Sedangkan ukuran sampel dan populasi penulis menggunakan rumus slovin, dimana penetapan sampel memperhitungkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi.

Rumus slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

Adapun jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebesar 4702, maka besarnya jumlah populasi tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga dan waktu maka penulis mengambil sampel dengan batas penelitian sebesar 5%, dengan menggunakan rumus slovin dengan populasi 4702 jiwa didapatkan sampel 369, kemudian teknik penarikan sampelnya digunakan secara proportionate stratified random sampling, yaitu suatu teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai

unsur/anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proposional (Sugiono, 2005 :

93). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Populasi dan Sampel di Kecamatan Kundur Barat**

No	Desa/Kelurahan	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Desa Sawang Kota	962	75	5
2.	Desa Sawang Selatan	592	46	5
3.	Desa Sawang Laut	699	55	5
4.	Desa Mukalimus	481	38	5
5.	Desa Layang	428	34	5
6.	Desa Kobel	635	50	5
7.	Desa Kundur	570	45	5
8.	Desa Mata air	335	26	5
	<b>Jumlah</b>	<b>4702</b>	<b>369</b>	<b>5</b>

**Sumber : Kantor Camat Kundur Barat Tahun 2010**

### 3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut akan dikelompokkan kemudian data dianalisa secara Deskriptif Kualitatif Analisis disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan kemudian diambil suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Karakteristik Wilayah**

Kecamatan Kundur Barat adalah salah satu dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Luas wilayah Kecamatan Kundur Barat  $\pm 255 \text{ Km}^2$ , dan memiliki 11 buah pulau, yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 7 Desa dengan Batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karimun.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kundur.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kundur Utara.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.

#### **Keadaan Demografi**

##### **1. Jumlah Penduduk Kecamatan Kundur Barat**

Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Penduduk wilayah Kecamatan Kundur Barat pada tahun 2010 berjumlah 20.025 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kundur Barat**

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
1	Sawang Kota	2389	2010	4399
2	Sawang Selatan	1213	1375	2588
3	Sawang Laut	1570	1868	3438
4	Muka Limus	1016	900	1916
5	Layang	828	787	1615
6	Kobel	1245	1088	2333
7	Kundur	1208	1047	2255
8	Mata Air	741	740	1481
Jumlah		10.210	9.815	20.025

**Sumber: Kantor Camat Kundur Barat 2010.**

Table IV.1 tersebut memperlihatkan jumlah penduduk di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun menurut jenis kelamin yang mana pria lebih banyak jumlahnya dari pada jenis kelamin wanita.

## **2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Faktor pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah kecamatan tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kecamatan Kundur Barat akan pentingnya pendidikan. Untuk lebih jelasnya

mengenai pendidikan penduduk wilayah Kecamatan Kundur Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table IV.2 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan**

**Kundur Barat**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	<b>Tingkat SD/MI</b>	<b>7680</b>	<b>38,3</b>
2	<b>Tamat SMP/MTs</b>	<b>4978</b>	<b>24,9</b>
3	<b>Tamat SLTA</b>	<b>2986</b>	<b>14,9</b>
4	<b>Tamatan Diploma</b>	<b>176</b>	<b>0,9</b>
5	<b>Tamatan S1/S2</b>	<b>82</b>	<b>0,4</b>
6	<b>Lain-lain</b>	<b>4123</b>	<b>20,6</b>
Jumlah		20.025	100

**Sumber: Kantor Camat Kundur Barat 2010.**

Dari table IV.2 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Kundur Barat sudah bias dikatakan baik, di mana di Kecamatan Kundur Barat secara mayoritas telah mengenyam pendidikan formal walaupun sebagian besar penduduk hanya sampai tingkat SD/MI. Dari table IV.2 di atas dapat diketahui dari sekian penduduk terdapat 7680 orang (38,3%) penduduk tamat SD/MI, kemudian 4978 orang (24,9%) tamat SMP/MTs, 2986 orang (14,9%) penduduk menamatkan SLTA, 176 orang (0,9%) menamatkan Diploma, 82 orang (0,4%) menamatkan S1/S2 dan dalam kategori lain-lain terdapat 4123 orang (20,6%).

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kecamatan Kundur Barat. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai. Pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada di Kecamatan Kundur Barat boleh dikatakan hampir seluruhnya tersedia kecuali perguruan tinggi, tetapi prasarana pendidikan yang tersedia sudah dapat dikatakan

telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah gedung-gedung sekolah yang ada telah mampu untuk menampung sebagian besar penduduk Kecamatan Kundur Barat pada usia sekolah

Keadaan yang disebut di atas ditunjang dengan adanya prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Mengetahui jumlah prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Kecamatan Kundur Barat dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Table IV.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kundur Barat**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>	<b>15</b>	<b>68,2</b>
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>	<b>16</b>	<b>27,3</b>
<b>3</b>	<b>SLTA</b>	<b>1</b>	<b>4,5</b>
Jumlah		22	100

**Sumber: Kantor Camat Kundur Barat 2010.**

Dari table IV.3 di atas menunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang paling banyak adalah pembangunan gedung SMP/MTs sebanyak 16 buah (27,3%). Berikutnya adalah prasarana gedung SD/MI sebanyak 15 buah (68,2%) dan SLTA 1 buah (4,5).

### **3. Mata Pencaharian Penduduk**

Adapun bentuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kecamatan Kundur Barat mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Kundur Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel IV.4 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan**

**Kundur Barat**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	<b>Petani</b>	<b>6093</b>	<b>30,4</b>
2	<b>Nelayan</b>	<b>5881</b>	<b>29,4</b>
3	<b>Buruh</b>	<b>4752</b>	<b>23,7</b>
4	<b>PNS/Honorer</b>	<b>263</b>	<b>1,3</b>
5	<b>Pedagang</b>	<b>231</b>	<b>1,2</b>
6	<b>Wiraswasta</b>	<b>1334</b>	<b>6,7</b>
7	<b>TNI/Polri</b>	<b>25</b>	<b>0,1</b>
8	<b>Dan lain-lain</b>	<b>1446</b>	<b>7,2</b>
Jumlah		20.025	100

**Sumber: Kantor Camat Kundur Barat 2010.**

Dari tabel IV.4 di atas dapat diketahui bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk Kecamatan Kundur Barat terdapat 6093 orang (30,4% Petani, 5881 orang (29,4%) sebagai Nelayan, 4752 orang (23,7%) sebagai Buruh, 263 orang (1,3) PNS/Honorer, 231 orang (1,2) Pedagang, 1334 orang (6,7%) Wiraswasta, 25 orang (0,2%) TNI/Polri dan lain-lain sebanyak 1446 orang (7,2%).

#### **4. Kehidupan Keagamaan**

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal; 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang ditangani oleh Falsafah Negara Pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama itu adalah:

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama.
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain.
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.5 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Kunder Barat**

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
<b>1</b>	<b>Islam</b>	<b>15975</b>	<b>79,8</b>
<b>2</b>	<b>Budha</b>	<b>4007</b>	<b>20,0</b>
<b>3</b>	<b>Protestan</b>	<b>14</b>	<b>0,14</b>
<b>4</b>	<b>Katolik</b>	<b>29</b>	<b>0,16</b>
<b>5</b>	<b>Hindu</b>	-	-
<b>6</b>	<b>Konghucu</b>	-	-
Jumlah		20.025	100

**Sumber: Kantor Camat Kunder Barat 2010.**

Dari tabel IV.5 di atas memperhatikan bahwa pemeluk agama mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 15975 atau 79,8%. Sedangkan yang minoritas beragama Protestan yaitu sebanyak 14 atau 0,14%

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana itu adalah tempat peribadatan. Di mana tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan

bangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Banyaknya tempat peribadatan di Kecamatan Kundur Barat dapat dilihat berikut ini:

**Tabel IV.6 Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Kundur Barat**

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	25	48,0
2	Musholla	23	44,3
3	Gereja	1	1,9
4	Vihara	3	5,8
5	Pura	-	-
Jumlah		52	100

Sumber: *Kantor Camat Kundur Barat 2010*.

Tabel IV.6 di atas memperlihatkan bahwa terdapat 25 Mesjid dan 23 Musholla sebagai sarana ibadah umat Islam, 3 Vihara sebagai sarana ibadah umat Budha dan 1 gereja sebagai sarana ibadah umat Kristen.

## **Struktur Pemerintahan**

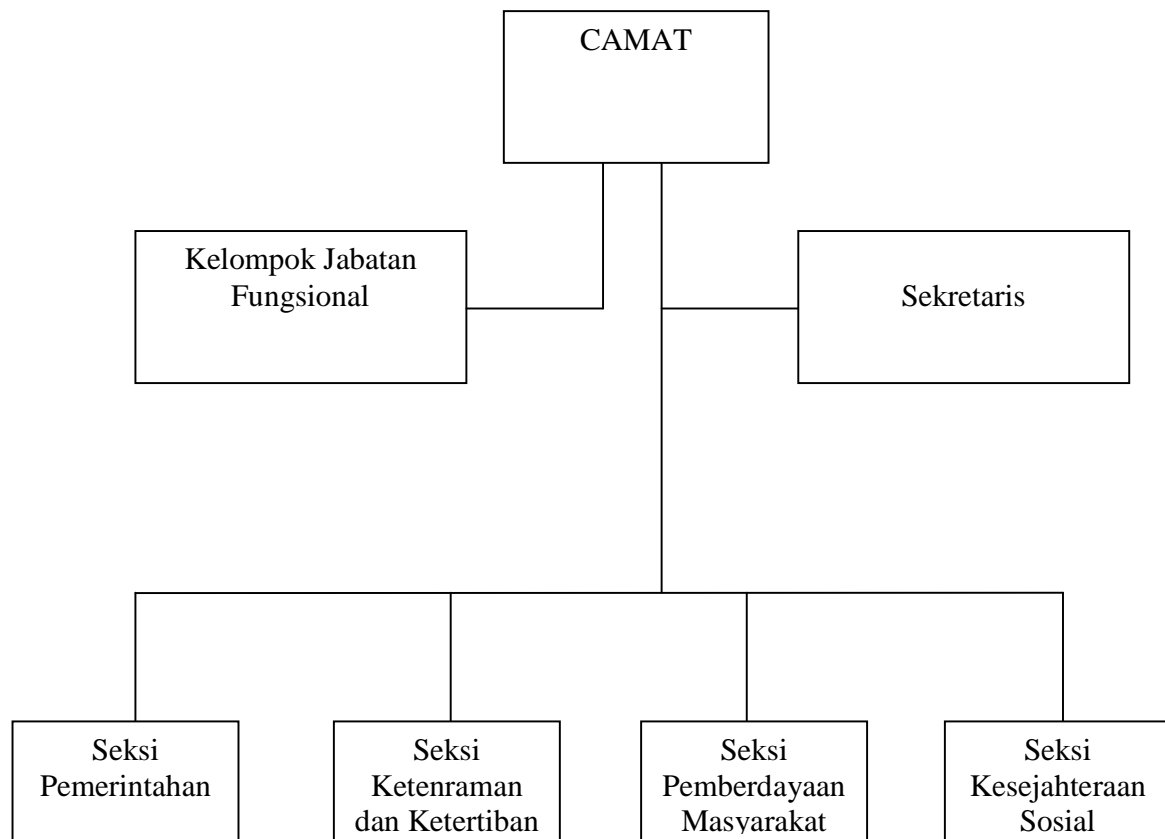
### **1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan**

Pelaksanaan pemerintah Wilayah Kecamatan Kunur Barat telah melaksanakan atau menerapkan Pola Maksimal, berdasarkan Peraturan Daerah No.09 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, maka Kecamatan Kundur Barat telah ditunjuk menjadi kecamatan dengan pola organisasi maksimal perihal yang sama, telah diusulkan pegawai yang akan menduduki Jabatan yang tersedia dalam pola organisasi maksimal dimaksud.

Kecamatan Kunder Barat merupakan salah satu dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun yang terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Adapun mengenai struktur organisasi dari pemerintahan Kecamatan Kunder Barat dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kunder Barat Kabupaten**

**Karimun**



## **2. Tugas dan Fungsi Camat**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota, dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaimana wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan membina Pemerintahan Desa/Kelurahan.
  - b. Melaksanakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan.
  - d. Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja Kecamatan.
- ### **3. Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan**

Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat kecamatan yang bertanggungjawab pada Camat. Adapun tugas dan fungsi perangkat Kecamatan yaitu:

**a. Sekretaris Kecamatan**

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyusun Rencana Kerja mengendalikan dan mengevaluasi Pelaksanaanya.
  - b. Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
  - c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**b. Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemeritnahan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan dan membina Pemerintahan umum, Kependudukan dan catatn sipil.

- b. Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang merupakan wewenang Kecamatan.
- c. Memberikan pelayanan, rekomendasi dan perizinan.
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**c. Seksi ketentraman dan Ketertiban**

- 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban Umum.
  - b. Melakukan koordinasi dan membina kesatuan pelindung masyarakat (LIMNAS) di wilayah kerja Kecamatan.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
  - c. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat.
  - d. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**e. Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Melakukan tugas penanggulangan bencana alam.
  - b. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
  - c. Melaksanakan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga masyarakat.
  - d. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.



**f. Seksi Lingkungan Hidup**

1. Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Melakukan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
  - b. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Identitas Responden**

Sebelum pembahasan ini dilanjutkan, ada baiknya dipaparkan identitas responden yang dimaksud guna lebih mengintensifkan penelitian, sebab adanya upaya pengenalan terhadap objek atau sasaran yang diteliti maka pengkajian tidak akan berhasil sesuai harapan, apalagi yang menyangkut klasifikasi persepsi dari objek yang akan diteliti, sehingga sangat perlu diadakan pengidentifikasikannya melalui tingkat pendidikan, tingkat umur dan jenis pekerjaan.

##### **1. Tingkat Pendidikan**

Sepanjang sejarah perkembangan dunia yang bersifat dinamis ini, faktor pendidikan menjadi kemutlakan yang harus diperhatikan dengan seksama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia. Artinya tuntutan akan pendidikan terus mengitari siklus kehidupan manusia, bahkan pendidikan senantiasa menempati posisi teratas dalam kriteria pencapaian suatu kualitas dan produktifitas yang baik.

Sehubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan sektor perpajakan bagi mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, maka konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai Wajib Pajak karena dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak.

Di sisi lain, pendidikan tidak hanya menjadi tuntutan terhadap aparatur/petugas kolektor melainkan menjadi keharusan setiap individu masyarakat sebagai Wajib Pajak, yang bermakna seperangkat pengetahuan dan pemahaman yang berorientasi pada pendidikan formal supaya apa yang menjadi kewajibannya dapat dipenuhi dengan baik termasuk pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden penelitian dari unsur-unsur masyarakat wajib pajak di Kecamatan Kundur Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.1 Keadaan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kundur Barat**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamatan SD	161	43,6
2	Tamatan SMP/MTs	82	22,2
3	Tamatan SLTA	73	19,8
4	Tamat Perguruan Tinggi/Akademi	53	14,4
<b>Jumlah</b>		<b>369</b>	<b>100</b>

**Sumber:** Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010.

Tabel V.1 di atas memperlihatkan tingkat pendidikan responden penelitian, yakni terdapat 161 responden (43,6%) yang berbekal pendidikan SD, kemudian terdapat pula 82 responden (22,2% dengan bekal pendidikan SMP/MTs, sebanyak 73 responden (19,8%) dengan pendidikan SLTA dan selebihnya 53 responden (14,4% yang sudah mencapai jenjang pendidikan tinggi yaitu sarjana dan Diploma.

## **2. Kelompok Umur**

Di samping tingkat pendidikan tersebut, identifikasi responden penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan

faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari.

Hal ini logis sekali bahwa kematangan pola pikir dalam usia seorang masyarakat wajib pajak sangat mewarnai penguasaan dan pemahaman atas berbagai system dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena dengan pemahaman itulah kewajiban pembayaran pajak dipenuhi oleh wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan setiap tahunnya.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat umur responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.2 Keadaan Kelompok Umur Responden Penelitian di Kecamatan**

**Kundur Barat**

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	26-35 tahun	71	19,2
2	36-45	107	29,1
3	46-55	102	27,6
4	56 ke atas	89	24,1
<b>Jumlah</b>		<b>369</b>	<b>100</b>

**Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010.**

Tabel V.2 di atas memperlihatkan kelompok umur responden penelitian, yakni terdapat 71 responden (19,2%) yang berumur 26-35 tahun, kemudian terdapat pula 107 responden (29,1%) yang berumur 36-45 tahun, sebanyak 102 responden (27,6%) berumur 46-55 tahun dan selebinya 89 responden (24,1%) yang sudah mencapai umur 56 ke atas.

### 3. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh rezki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pekerjaan erat hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi dan akan menentukan perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari.

Untuk mengetahui lebih jelas jenis pekerjaan responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.3 Jenis Pekerjaan Responden Penelitian di Kecamatan Kundur Barat**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	88	23,8
2	Nelayan	106	28,7
3	Buruh	47	12,7
4	PNS/Honorar	68	18,4
5	Pedagang	20	5,4
6	Wiraswasta	40	11
<b>Jumlah</b>		<b>369</b>	<b>100</b>

**Sumber:** Hasil Lapangan Tahun 2010.

Tabel V.3 di atas memperlihatkan mata pencaharian responden penelitian, yakni terdapat 88 responden (23,8%) yang bekerja sebagai Petani, kemudian terdapat pula 106 responden (28,7%) yang bekerja sebagai Nelayan, sebanyak 47 responden (12,7%) bekerja sebagai Buruh, 68 responden (18,4) bekerja PNS/Honorar, 20 responden (5,4%) bekerja sebagai Pedagang dan selebihnya 40 responden (11%) yang bekerja sebagai Wiraswasta.

## 5.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Membayar PBB di Kecamatan Kundur Barat.

### 1. Besarnya Jumlah Pembayaran PBB

Dari seluruh responden yang membayar PBB di Kecamatan Kundur Barat terdapat tiga (3) kategori yaitu kategori besar, sedang dan kecil.

Untuk lebih jelasnya melihat partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang dilihat dari jumlahnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.4 Jumlah Responden yang Membayar PBB Menurut Besarnya Uang yang di Bayar di Kecamatan Kundur Barat**

No	Jumlah Yang Membayar	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	>Rp. 75.000	44	11,9
2	Rp. 25.000- Rp. 75.000	108	29,3
3	< Rp. 25.000	217	58,8
<b>Jumlah</b>		<b>369</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010.

Dari tabel V.6 di atas diketahui bahwa, terdapat 217 atau 58,8% dari responden yang membayar PBB dengan kategori kecil yaitu membayar kurang Rp. 25.000 tiap tahun, 108 atau 29,3% dari responden yang membayar PBB dengan kategori sedang yaitu membayar antara Rp. 25.000 sampai Rp. 75.000 tiap tahun dan 44 atau 11,9% responden membayar PBB dengan kategori besar yaitu lebih Rp. 75.000 tiap tahun.

## 2. Tingkat Disiplin Membayar PBB

Bagi responden yang tidak pernah menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, ini berarti responden atau Wajib Pajak mempunyai disiplin yang tinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahun.

Namun demikian perlu diketahui tingkat disiplin tersebut berdasarkan kapan mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Ada tiga (3) kategori waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu membayar pada waktu yang lebih awal setelah menerima SPPT, membayar pada pertengahan tahun setelah menerima SPPT dan membayar pada waktu akhir tahun atau hampir jauh tempo setelah menerima SPPT.

Untuk melihat tingkat disiplin responden dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kundur Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.5 Tingkat Disiplin Responden Membayar PBB di Kecamatan Kundur Barat**

No	Waktu Pembayaran PBB	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	< 1 bulan setelah menerima SPPT	52	14,1
2	1-6 bulan setelah menerima SPPT	130	35,2
3	>6 bulan setelah menerima SPPT	187	50,7
<b>Jumlah</b>		<b>369</b>	<b>100</b>

**Sumber:** Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010.

Jika dilihat dari tabel V.7 di atas diketahui bahwa terdapat 52 atau 14,1% dari responden membayar PBB dengan tingkat disiplin yaitu kurang dari satu (1) bulan

setelah menerima SPPT dan 130 atau 35,2% dari responden membayar PBB dengan tingkat disiplin sedang yaitu membayar pada satu (1) sampai enam (6) bulan setelah menerima SPPT, kemudian terakhir terdapat 187 atau 50,7% dari responden membayar PBB dengan tingkat disiplin rendah yaitu membayar pada waktu enam (6) sampai akhir tahun/jatuh tempo pembayaran setelah menerima SPPT.

### **3. Tingkat Pelayanan Pembayaran PBB**

Tingkat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor rangsangan bagi responden atau wajib pajak dalam disiplin membayar Pajak Bumi dan Bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar atau pengalaman dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan pelayanan yang baik, mudah, cepat dan aman, maka tingkat partisipasi pembayaran akan dapat dipertahankan.

Sebaliknya apabila pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut buruk, susah, lambat dan tidak aman, maka responden sebagai wajib pajak akan enggan membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada waktu yang tepat, bahkan mungkin diundur-undur atau menunggak sama sekali.

Untuk itu kepada responden tingkat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di bagi tiga (3) kategori yaitu pelayanan yang baik, cukup baik dan kurang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:



**Tabel V.6 Tingkat Pelayanan Pembayaran PBB di Kecamatan Kundur Barat**

No	Tingkat Pelayanan Pembayaran PBB	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	40	10,9
2	Cukup Baik	141	38,2
3	Kurang Baik	188	50,9
<b>Jumlah</b>		<b>369</b>	<b>100</b>

**Sumber:** Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010.

Dari tabel V.8 di atas terlihat, 40 atau 10,9% dari responden mengatakan bahwa pelayanan pembayaran PBB baik, dan 141 atau 38,2% dari responden mengatakan pelayanan pembayaran PBB cukup baik kemudian 188 atau 50,9% dari responden mengatakan pembayaran PBB kurang baik.

#### **4. Frekuensi Penyuluhan PBB**

Frekuensi penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor ransangan bagi responden atau wajib pajak dalam berpartisipasi dan disiplin membayar Pajak Bumi dan Bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar, pengalaman dan pengetahuan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat.

Penyuluhan wajib pajak adalah pemberian pengetahuan kepada wajib pajak agar lebih mengerti tentang arti dan fungsi pajak. Untuk melihat tingkat penyuluhan yang dilakukan kolektor atau aparat pemerintahan tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu tahun di Kecamatan Kundur Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.7 Frekuensi Penyuluhan PBB di Kecamatan Kundur Barat**

No	Frekuensi Penyuluhan PBB	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	3 kali	64	17,3
2	2 kali	104	28,2
3	Tidak pernah	201	54,5
<b>Jumlah</b>		<b>369</b>	<b>100</b>

**Sumber:** *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010.*

Dari tabel V.9 di atas diketahui bahwa terdapat 64 atau 17,3% dari responden mengatakan hanya 3 (tiga) kali pihak perpajakan atau kolektor/petugas PBB melakukan penyuluhan, dan 104 atau 28,2 % dari responden mengatakan hanya 2 (dua) kali pihak perpajakan atau kolektor/petugas PBB melakukan penyuluhan, kemudian 201 atau 54,5% dari responden mengatakan tidak pernah.

### **5. Manfaat PBB Yang Dirasakan Masyarakat**

Salah satu faktor dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sejauh mana uang yang sudah dibayar masyarakat itu dapat dimanfaatkan kembali kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini ditanyakan manfaat yang telah dirasakan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.8 Jawaban Responden Tentang Manfaat PBB bagi Masyarakat di  
Kecamatan Kundur Barat**

No	Manfaat PBB yang Dirasakan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Bermanfaat	93	25,2
2	Cukup Bermanfaat	91	24,7
3	Tidak Bermanfaat	185	50,1
<b>Jumlah</b>		<b>369</b>	<b>100</b>

**Sumber:** *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010.*

Dari tabel V.10 di atas terdapat 93 atau 25,2% dari responden mengatakan PBB bermanfaat bagi masyarakat dan 91 atau 24,7% dari responden mengatakan PBB cukup bermanfaat kemudian terakhir terdapat 185 atau 50,1% dari responden mengatakan PBB tidak bermanfaat.

#### **Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan meningkatkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Di mana bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan ekonomi sosial yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya dan memperoleh manfaat daripadanya, oleh karena itu wajar kiranya mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

## **1. Penyusunan Data Awal**

Penyusunan data awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh Objek PBB dalam suatu wilayah tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Dalam penyusunan data awal dicatat keterangan mengenai objek dan subjek PBB, termasuk dari nama, alamat, dan dilengkapi dengan pengisian SPOP oleh wajib pajak dan dikembalikan kepada Dirjen Pajak. Wajib pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Dirjen Pajak.

SPOP yang diterima harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Yang dimaksud dengan jelas ini adalah agar penulisan data yang diminta dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan benar adalah data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

## **2. Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan data yang dikumpulkan petugas akan ditentukan besarnya biaya kena pajak suatu objek pajak atau besarnya pajak terhutang. Besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak juga tergantung kepada klasifikasi objek pajak yang dimilikinya. Untuk menentukan besarnya tarif pajak dipakai rumus  $0,5\% \times 20\% \times \text{NJOP}$  (Nilai Jual Objek Pajak).

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas minimal Nilai Jual Objek Pajak yang menurut ketentuan Undang-undang tidak dikenakan pajak. Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No.12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 menyatakan bahwa besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP TKP) adalah Rp. 8.000.000.00 untuk setiap wajib pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ini diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 menjadi setinggi-tingginya Rp. 12.000.000.00 untuk setiap wajib pajak.

Misalkan: Fitri memiliki sebuah rumah di kawasan Semarang dengan luas tanah  $800 \text{ M}^2$  dengan NJOP-nya Rp. 160.000.000., luas bangunan seluas  $400 \text{ m}^2$ , dengan NJOP-nya Rp. 90.000.000. Hitung PBB tahun 2007 untuk tanah dan bangunan tersebut.

*Jawab:*

Luas tanah = 800 m<sup>2</sup>, NJOP Rp. 160.000.000

Luas bangunan = 400 m<sup>2</sup>, JOP Rp. 90.000.000

Perhitungan PBB tahun 2007:

NJOP Tanah=800 m<sup>2</sup> = Rp. 160.000.000

NJOP = Rp. 250.000.000

NJOP Tanah dan Bangunan = Rp. 250.000.000

NJOP TKP = Rp. 12.000.000

NJOP untuk perhitungan PBB = Rp. 238.000.000

NJKP = 20% X NJOP untuk perhitungan PBB

= 20% X Rp. 238.000.000 = Rp. 47.600.000

PBB = 0,5% X NJKP

= 0,5% X Rp. 47.600.00 = Rp. 238.00

### **3. Penerbitan dan Pengiriman SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)**

Dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat diterbitkan apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP setelah melewati jangka waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP.

Surat pemberitahuan Pajak Terhutang yang telah diselesaikan dan ditandatangani oleh kepala kantor PBB, kemudian dikirimkan kepada wajib pajak.

Dalam pengiriman SPPT ini juga mempengaruhi motivasi atau dorongan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pengiriman SPPT melalui kelurahan yang ada di Kecamatan Kunder Barat, dari petugas kelurahan langsung diberikan kepada wajib pajak.

Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jadi, bila seorang wajib pajak menerima SPPT pada tanggal 1 Maret 2009, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2009 ia harus sudah melunasi PBB-nya. Tanggal 31 Agustus ini disebut juga tanggal jatuh tempo.

#### **4. Tata Cara dan Tempat Pembayaran PBB**

Dalam proses penerimaan PBB cara dan tempat pembayaran akan mempengaruhi dalam peningkatan pembayaran, karena cara yang mudah tidak berbelit-belit dan tempat pembayaran yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal menghemat waktu dalam pembayaran PBB-nya.

Oleh karena itu sebaliknya tempat pembayaran ini dapat terjangkau oleh wajib pajak dan tidak memakan waktu yang lama untuk sampai ke tempat pembayaran tersebut.

Adapun tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 11 UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT, Surat pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut:

1. Pelunasan/pembayaran Pajak berdasarkan SPPT

Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2. Pelunasan/pembayaran Pajak berdasarkan SKPKB

Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak.

3. Pelunasan/pembayaran Pajak berdasarkan STP

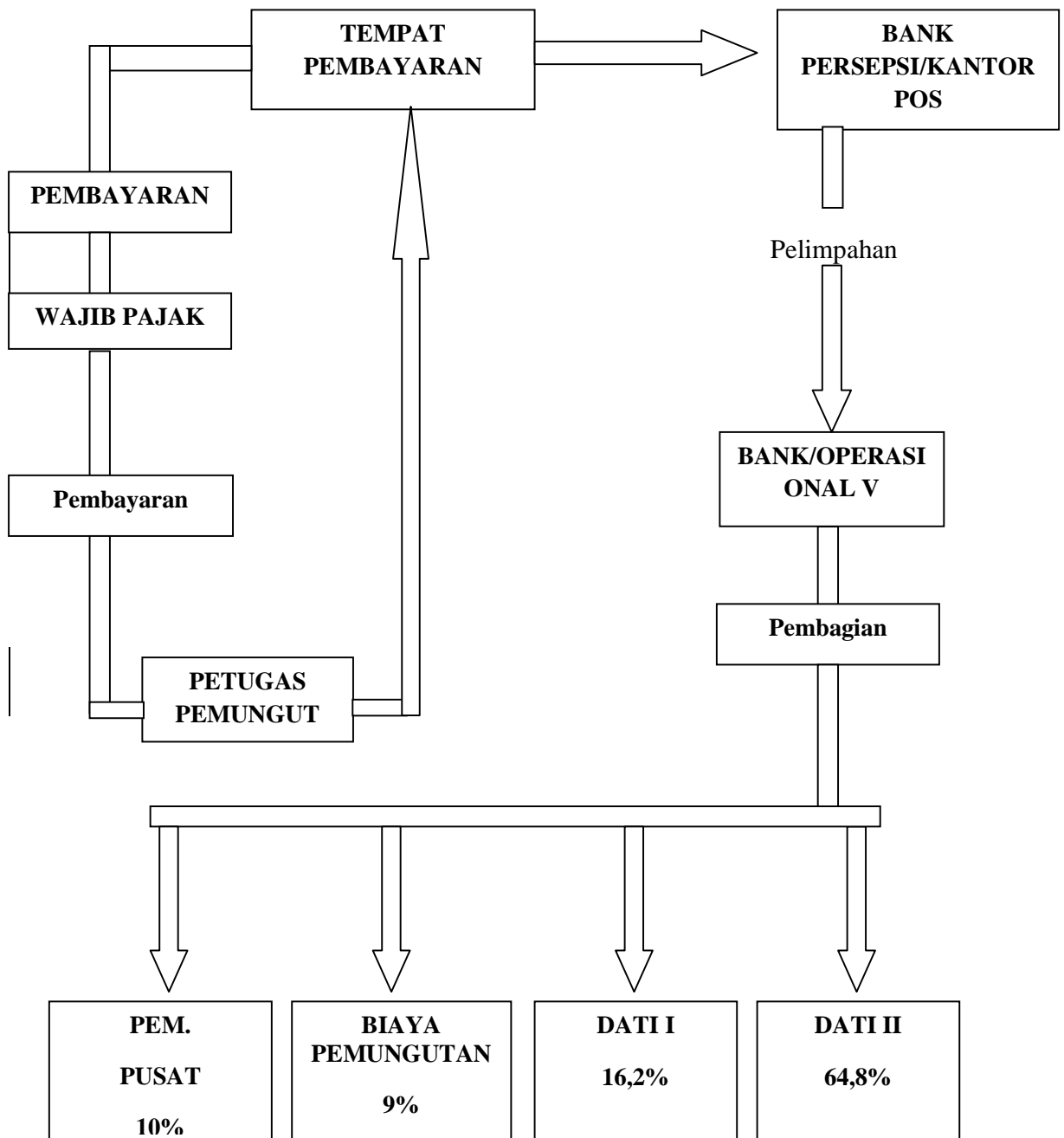
Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak. STP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak yang tidak melunasi atau kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh tempo.

Sedangkan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang baik yang tercantum pada, SPPT, SKPKB maupun STP dilakukan di:



1. Bank Pemerintah (Bank persepsi) kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN).
2. Kantor Pos dan Giro
3. Petugas pemungut yang ditunjuk (*collector*) secara resmi. Petugas yang ditunjuk tersebut harus menyetorkan hasil tagihan setiap hari ke tempat pembayaran yaitu bank Persepsi/kantor Pos dan Giro.

**Gambar V.1 Alur Penerimaan PBB**



## **5. Pengurangan, Keberatan dan Banding**

Dalam penetapan besarnya wajib pajak membayar PBB sering terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan SPPT. Seandainya terjadi kesalahan tersebut wajib pajak dapat mengajukan keberatan, banding dan pengurangan atas hutang pajaknya yang tertera di dalam SPPT-nya. Bahkan bagi mereka yang tidak sanggup pun dapat mengajukan keberatan dan arena masalah lain seperti pada lahan pertanian yang tidak produktif.

Petugas pelayanan kantor PBB memberikan kemudahan semudah mungkin bagi wajib pajak dalam melunasi hutang PBB-nya dan seluruh keluhan yang datang dari wajib pajak mereka selalu akan mencari jalan keluarnya. Dan surat usulan keberatan ini setelah mereka terima mereka langsung meninjau objek pajak yang ada kalau memang terjadi kesalahan pada mereka, mereka akan memperbaikinya tetapi kalau seandainya wajib pajak yang mengada-ada mereka akan langsung menindaknya dengan sanksi yang telah ditentukan.

Besarnya PBB dapat diminta pengurangan apabila dalam hal:

1. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, seperti lahan pertanian/perkebunan/perikanan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak perseorangan, objek pajak yang nilai jualnya meningkat disebabkan karena adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak perseorangan yang berpenghasilan

rendah, objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak perseorangan yang penghasilannya semata-mata berasal dari pesiun, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi, objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan dan objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah lainnya sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. Besarnya pengurangan untuk hal-hal tersebut di atas ditetapkan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) oleh kepada kantor pelayanan PBB berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat penghasilan wajib pajak yang besarnya PBB yang terhutang.

2. Subjek pajak yang terkena bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor dan sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman dan hama tanaman.

Besarnya pengurangan untuk objek pajak yang terkena bencana alam dan sebab-sebab yang lain yang luar biasa ditetapkan samapai dengan 100% ) seratus persen) oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB.

Adapun ketentuan tentang keberatan menurut pasal 15 dan 16 UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 adalah sebagai berikut:

1. Keberatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu SPPT dan SKP.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.
3. Keberatan diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak diterimanya SPPT maupun SKP, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya.
4. Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengirim Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.
5. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Bulan Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, jika dalam jangka waktu tersebut telah lewat, Dirjen Pajak belum menerbitkan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Isi keputusan atas surat keberatan dapat berupa

mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Sedangkan ketentuan banding menurut Pasal 17 UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 adalah sebagai berikut.

1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
2. Banding diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan, dengan cara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan bukti yang diperlukan dan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
3. Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.
4. Permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak yang bersangkutan.
5. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan).

## **6. Penagihan**

Setelah SPPT dikirim kepada wajib pajak, dan wajib pajak harus melunasi hutang PBB-nya selambat-lambatnya 6 bulan setelah diterimanya SPPT tersebut. Kalau wajib pajak tetap tidak membayar hutang pajaknya dalam waktu yang telah disediakan oleh KP-PBB maka akan diadakan penagihan atas hutang PBB tersebut.

Pelaksanaan penagiha mereka lakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu 17 hari setelah jatuh tempo, kalau tidak juga wajib pajak melunasi hutang PBB-nya akan diberikan surat teguran yang berlaku paling lama 21 hari.

Kemudian kalau wajib pajak tidak juga melunasi hutang PBB-nya akan diberikan surat paksa kepada mereka yang hanya berlaku 1x24 jam, kalau juga wajib pajak tidak melunasi hutangnya akan diberikan surat perintah melakukan penyitaan. Bahkan mereka mengatakan setelah dikeluarkan surat paksa berminggu-minggu bahkan sampai hitungan bulan masih diberikan keringanan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang PBB-nya.

## **7. Sanksi**

Wajib pajak ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena lupa akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak, maupun pejabat yaitu:

### **Bagi Wajib Pajak:**

1. Karena kealpaanya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal ini tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak dan meyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan selama-lamanya 6 (bulan) atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terhutang
2. Karena kesengajannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal ini tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen

Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terhutang.

**Bagi Pejabat:**

Sanksi umum dikenakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku antara lain, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Staatsblad 1860 No.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Sanksi Khusus dalam hal tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan document yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulisia menguraikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang telah penulis laksanakan, dari kesimpulan tersebut penulis memberikan beberapa saran yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

#### **Kesimpulan**

1. Besar jumlah PBB yang dibayar oleh masyarakat Kundur Barat sebagian besar 58,8% kurang dari Rp. 25.000 setiap subjek pajak PBB dan 29,3% membayar antara Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 75.000 dan terakhir 11,9 % membayar lebih dari Rp. 75.000 tiap tahun.
2. Tingkat disiplin membayar PBB di Kecamatan Kundur Barat ternyata sebagian responden (50,7%) membayar enam (6) bulan sampai akhir/tahun jatuh tempo pembayaran setelah menerima SPPT.
3. Tingkat pelayanan pembayaran PBB di Kecamatan Kundur Barat 10,9% dari masyarakat menyatakan baik, 38,2% menyatakan cukup baik dan 50,9% menyatakan kurang baik.
4. Frekuensi penyuluhan yang dilakukan pihak perpajakan atau kolektor/petugas PBB atau kantor pelayanan PBB ternyata kurang baik di mana 54,5% dari responden menyatakan tidak pernah ada penyuluhan,

28,2% menyatakan hanya 2 kali, dan 17,3% menyatakan penyuluhan hanya dilakukan tiga kali.

5. Terdapat 24,7% dari responden menyatakan uang yang dibayar untuk PBB cukup bermanfaat untuk pembangunan sarana dan prasarana, 25,2% menyatakan bermanfaat dan 50,1% menyatakan tidak bermanfaat.

### **Saran-saran**

1. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kecamatan Kundur Barat hendaklah dalam menetapkan besarnya jumlah yang akan dibayar (pajak terutang) dan selalu akurat oleh karena itu kantor pelayanan PBB, dirasakan perlu mendata ulang setiap tahun objek pajak yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Perlu ditingkatkan penggunaan PBB untuk kepentingan Masyarakat khususnya dalam membangun sarana dan prasarana masyarakat dengan mencantumkan papan nama proyek yang bersumber dari dana PBB.
3. Perlu diadakan penyuluhan secara priodik oleh kantor pelayanan PBB untuk meningtkkan wawasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar PBB, tentang cara menetapkan nilai objek pajak, prosedur pembayaran, pengurangan keberatan dan banding serta sanksi-sanksi lainnya.
4. Diharapkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta tanggung jawab akan kewajibanya dalam membayar PBB.

5. Diharapkan instansi yang terkait dalam pemberian pelayanan PBB di Kecamatan Kundur Barat dapat terkoordinir dengan baik, dengan harapan tujuan dapat tercapai sebagaimana mestinya.
6. Pelaksanaan prosedur pemungutan PBB diharapkan sesuai dengan prosedurnya guna mempercepat penyampaian informasi tentang pajak terhutang Para Wajib Pajak di Kecamatan Kundur Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex, 2005, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Surabaya : Karya Harapan.
- Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Davis, Keith dan Jhon W. Nestrom., 1985. *Prilaku dalam Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Ismawan, Indra. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta, 2004.
- Markus, Muda. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Nasution , akbar. *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : PT. Sofmedia, 2009.
- Pandingan, Liberty., 2002. *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Panggabean, D., 1998. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Desa Hutan*, Medan : USU.
- Pasaribu, I.L, dan Simandjuntak.B., 1986. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung : Tasrito.
- Pudyatmoko, Sri., 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Aditya Medya.
- Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi, Jilid 1*. Jakarta : PT. INDEXS Kelompok GRAMEDIA, 2003.
- Sanit, A.1990. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Aditya Medya.
- Sastropetro, 1998. *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dala Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni.
- Siagian, Sondang P., 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Sukirno, Sadono., 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Kencana.

Sugiyono., 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000.

Tjokroamidjojo, Bintoro., 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

**SUMBER-SUMBER:**

- Kantor Camat Kecamatan Kundur Barat Kab.Karimun
- [www.google.com](http://www.google.com)

**KUESIONER**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

**1. Petunjuk Pengisian Angket**

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Saudara untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
- b. Angket ini disusun semata-mata untuk penelitian ilmiah dan tidak akan berpengaruh kepada Bapak/Saudara.
- c. Lingkari pilihan jawaban yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

**2. Identitas Responden**

- a. Pendidikan Akhir : .....
- b. Pekerjaan : .....
- c. Umur : .....

**3. Pertanyaan**

1. Apakah Bapak/Saudara tahu tentang Pajak Bumi dan Bangunan?
  - a. Iya
  - b. Kurang Tahu
  - c. Tidak Tahu

2. Apakah Bapak/Saudara tahu arti penting Pajak Bumi dan Bangunan bagi pembangunan?
  - a. Iya
  - b. Kurang Tahu
  - c. Tidak Tahu
3. Apakah Bapak/Saudara sudah membayar pajak dengan baik sesuai besar pembayaran yang telah ditetapkan ?
  - a. Iya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak Pernah
4. Berapa besar pembayaran yang Bapak/Saudara bayar tiap tahunnya?
  - a. Lebih besar dari Rp. 75.000
  - b. Rp. 25.000 – Rp. 75.000
  - c. Kurang dari Rp. 25.000
5. Selama tiga tahun terakhir (2007,2008 dan 2009) apakah tariff pajak yang Bapak/Saudara bayar selalu berubah ?
  - a. Iya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak Pernah

6. Kapan Bapak/Saudara membayar PBB jika surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) telah bapak terima?
- a. 1 bulan setelah menerima SPPT
  - b. 1-6 bulan setelah menerima SPPT
  - c. Lebih dari 6 bulan setelah menerima SPPT
7. Bagaimana pelayanan dalam pembayaran PBB?
- a. Baik
  - b. cukup baik
  - c. kurang baik
8. Dalam setahun berapa kalikah pihak kolektor/pegawai pajak atau Kantor Pelayanan Pajak melakukan penyuluhan tentang PBB?
- a. 3 kali
  - b. 2 kali
  - c. tidak pernah
9. Dalam setahun berapa kalikah pihak kolektor/pegawai melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
- a. 3 kali
  - b. 2 kali
  - c. tidak pernah
10. Apakah Bapak/Saudara merasakan manfaat dari pembayaran PBB?
- a. Bermanfaat
  - b. Cukup bermanfaat
  - c. Tidak bermanfaat



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. I : Target dan Realisasi Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Karimun .....	8
Tabel I 2 : Realisasi Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Karimun Tahun 2009 Menurut Kecamatanany .....	9
Tabel I. 3 : Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Kundur Barat .....	10
Tabel I. 4 : Jumlah Populasi dan Sampel di Kecamatan Kundur Barat .....	33
Tabel IV. I : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kundur Barat.....	35
Tabel IV. 2 : Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Kundur Barat.....	36
Tabel. IV. 3 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kundur Barat .....	37
Tabel. IV. 4 : Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Kundur Barat.....	38
Tabel. IV. 5 : Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Kundur Barat.....	39
Tabel. IV. 6 : Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Kundur Barat .....	40
Tabel. V. I : Keadaan Tingkat Pendidikan Responden Penelitian di Kecamatan Kundur Barat.....	48
Tabel. V. 2 : Keadaan Kelompok Umur Responden Penelitian di Kecamatan Kundur Barat.....	49
Tabel V. 3 : Jenis Pekerjaan Responden Penelitian di Kecamatan Kundur Barat.....	50
Tabel V. 4 : Jumlah Responden yang Membayar PBB Menurut Besarnya Uang yang di Bayar di Kecamatan Kundur Barat .....	51
Tabel V. 5 : Tingkat Disiplin Responden Membayar PBB di Kecamatan Kundur Barat.....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar IV. 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Kundur Barat .....	41
Gambar V. 1 : Alur Penerimaan PBB .....	63